

REKONSEPTUALISASI KEWARGANEGARAAN NON-MUSLIM DI INDONESIA

ANALISIS KORPUS-LINGUISTIK DAN WACANA
KRITIS TERHADAP ISTILAH KAFIR/NON-MUSLIM
DI SITUS NU DAN SALAFI

Zainal Pikri, Ahmad Syadzali, Najla Amaly

Rekonseptualisasi Kewarganegaraan Non-Muslim di Indonesia: Analisis Korpus-Linguistik dan Wacana Kritis Terhadap Istilah Kafir/Non-Muslim di Situs NU dan Salafi

Zainal Pikri
Ahmad Syadzali
Najla Amaly



Penerbitan ini didukung dan
didanai oleh
UIN Antasari Banjarmasin

Penerbitan ini didukung dan didanai oleh
UIN Antasari Banjarmasin

Pikri, Zainal

Syadzali, Ahmad

Amaly, Najla

Rekonseptualisasi kewarganegaraan non-muslim di
indonesia: analisis korpus-linguistik dan wacana kritis
terhadap istilah kafir/non-muslim di situs NU dan salafi/ oleh
Zainal Pikri, Ahmad Syadzali dan Najla Amaly

v+117 halaman; 15.5 x 23 cm
termasuk daftar pustaka

Editor: Zainal Pikri

Desain Cover: Zainal Pikri

ISBN

ISBN10: (hbk)

ISBN10: (ebk)

ISBN13: (hbk)

ISBN13: (ebk)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan petunjuk, bimbingan lahir bathin kepada diri penulis, sehingga laporan penelitian yang sederhana ini dapat disusun dan diterbitkan.

Shalawat dan salam penulis haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. keluarga, dan para sahabat serta pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongannya. Untuk itu ucapan terimakasih dan penghargaan penulis sampai kepada:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin, atas segala kebijakan, perhatian dan dorongan sehingga dapat terselenggaranya proyek penelitian ini.
2. Kepala LP2M dan Ketua PUSLIT UIN Antasari Banjarmasin, atas segala kebijakan dan perkenannya sehingga peneliti dapat melakukan penelitian ini.
3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan masukan, dukungan dan motivasinya sehingga rampungnya penelitian ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berganda-ganda dari Allah SWT dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menghajatkannya.

Akhirnya penulis berharap, semoga usaha kecil ini bermanfaat, khususnya kepada penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya, Amiin.

Banjarmasin, November 2020

Penulis

KATA PENGANTAR
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah swt., kita bisa merampungkan seluruh proses penelitian pada tahun anggaran 2020 melalui program Litapdimas dengan dana BOPTN ini. Pada tahun ini, Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah telah meloloskan sebanyak 78 judul dengan kluster yang lebih beragam dibandingkan pada tahun 2019, yaitu kluster penelitian pembinaan/ peningkatan kapasitas, penelitian dasar pengembangan program studi, penelitian dasar interdisipliner, penelitian pengembangan pendidikan tinggi, penelitian terapan kajian strategis nasional, penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi, dan penerbitan buku ajar.

Gabungan antara penelitian, pengabdian, dan publikasi (penerbitan) buku ajar menjadikan kegiatan di tiga jenis kluster ini untuk memenuhi tuntutan bagian penting dari tridharma perguruan tinggi (di samping Pendidikan dan pengajaran) menjadi pertanda bahwa pada tahun 2020 ini, harapan yang ditumpukan pada LP2M melalui Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah semakin besar. Memang, pendidikan dan pengajaran tidak lepas dari keharusan dosen dan penelitian mengupdate pengetahuan dengan penelitian, mengaplikasikan ilmunya melalui pengabdian, serta menyebarluaskan gagasannya melalui publikasi.

Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah yang dilaksanakan pada tahun ini memang terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di situasi mewabahnya Covid-19 dan anggaran perguruan tinggi ditarik untuk penanganan wabah ini, kita bersyukur bahwa Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Antasari termasuk di antara 30 perguruan tinggi keagamaan lain yang sempat mencairkan dana penelitian, sedangkan sebanyak 28 perguruan tinggi keagamaan lainnya tidak bisa mencairkannya, dan harus ditunda pendanaannya pada 2021. Ini adalah sebuah prestasi yang perlu disyukuri. Namun, di sisi lain, kesyukuran itu tentu juga harus dibuktikan dengan kinerja pelaksanaan penelitian, pengabdian, dan publikasi yang berkualitas dan tepat waktu.

Dari hasil survei untuk monitoring pelaksanaan penelitian pada tahun, mewabahnya Covid-19 ini memang menjadi kendala untuk pengumpulan data yang ditarik dari lapangan pada kluster penelitian dan pelaksanaan pengabdian pada kluster pengabdian. Memang, sebagian besar dari penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan. Namun, kendala itu bisa diatasi dengan penerapan protokol kesehatan. Kini kita bersyukur bahwa penelitian, pengabdian, dan publikasi ini bisa berjalan dan ditulis laporan dengan baik. Penelitian lapangan dan penelitian literatur pada prinsipnya sama pentingnya. Berkaca dari situasi pandemik yang kita alami ini ada baiknya pada tahun-tahun akan datang, perlu diperkuat lagi penelitian-penelitian literatur. Selain karena alasan yang tampak incidental tahun ini, hal yang paling mendasar adalah bahwa kita perlu memberikan keseimbangan antara kajian-kajian literatur dan kajian-kajian empiris.

Agar penelitian dan pengabdian bisa dibaca luas, kami berharap agar laporan final bisa dikemas dalam bentuk artikel dan buku, sehingga informasi-informasi berharga yang ada di dalamnya bisa menambah pengetahuan masyarakat, baik masyarakat perguruan tinggi maupun masyarakat umumnya, serta bisa dijadikan sebagai dasar berbagai kemungkinan penerapan dan aplikasinya dalam kebijakan. Berkaitan dengan publikasi buku, tentu lebih baik jika disebarluaskan, baik melalui e-book maupun kerjasama dengan penerbitan yang memungkinkan distribusi secara luas. Tentu saja, hajat juga kita rasakan untuk menyediakan buku ajar pada mata kuliah di kalangan mahasiswa di UIN Antasari. Pada tahun yang lalu (2019), dengan semangat yang sama, penerjemahan buku-buku ajar berbahasa asing ke Bahasa Indonesia yang dilaksanakan untuk menyahuti pentingnya akses mahasiswa ke literatur-literatur mata kuliah secara lebih luas. Semoga publikasi karya dosen ini, baik dari hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun buku ajar, turut mewarnai perkembangan keilmuan secara lebih luas, memberikan manfaat yang signifikan, dan memberikan akses yang lebih mudah dan lebih luas. *Amin ya rabb al-'alamin.*

Kepala,

Dr. H. Wardani, M.Ag.

Daftar Isi

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
<i>A. Latar Belakang</i>	1
<i>B. Permasalahan</i>	4
<i>C. Tujuan</i>	5
<i>D. Signifikansi</i>	6
<i>E. Penelitian Terdahulu</i>	7
<i>F. Metode, Analisis Data, dan Telaah Teoritik</i>	11
BAB II	20
KAJIAN TEORITIK.....	20
BAB III	28
HASIL	28
<i>A. Hasil Penelitian</i>	28
<i>B. Diskusi Data/ Temuan Penelitian</i>	85
BAB IV	100
KESIMPULAN	100
<i>A. Kesimpulan</i>	100
<i>B. Penutup</i>	101
<i>Daftar Pustaka</i>	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdebatan konsep kewarganegaraan non-Muslim di berbagai negara berpenduduk mayoritas Muslim diwarnai ketegangan antara gagasan tradisional kewarganegaraan berbasis agama dan konsepsi modern kewarganegaraan yang berbasis teritorial negara bangsa (An-Na'im, 2010; Ellis, 2018). Upaya reformulasi kewarganegaraan kontemporer di negara-negara mayoritas Muslim dengan kembali kepada model ahlu al-dzimmah banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok Salafi, walaupun mereka berbeda pada ekstensi (*extent*), isi (*content*), dan kedalamannya (*depth*) (Poljarevic, 2017; Scott, 2007).

Fenomena kembalinya ahlul al-dzimmah dalam teori dan praktek dapat dilihat pada reteologisasi, persekusi, dan penerapan syariat di berbagai negara, termasuk Indonesia (Durie & Bat Ye'or, 2009). Juga dapat dilihat pada penggunaan istilah untuk menyebut non-Muslim. Apakah non-Muslim dalam negara mayoritas Muslim senang disebut *dzimmi*, *ahli kitab*, atau *nasara* menjadi problem karena dipandang bertentangan dengan prinsip kesetaraan warga negara (*equal citizens*) (Rabo, 2012).

Di Indonesia, walaupun secara formal demokrasi telah diberlakukan, namun perdebatan tentang kewarganegaraan masih terbelah antara pihak yang memperjuangkan gagasan dan praktek kewarganegaraan yang dibedakan berdasarkan agama (*religiously differentiated citizenship*) dan pihak yang memperjuangkan kewarganegaraan yang inklusif (*inclusive citizenship*). Tantangan terhadap konsep dan praktek kewarganegaraan pluralis datang dari gerakan Islam transnasional, juga dari kubu konservatif dalam tubuh organisasi Islam moderat seperti Muhammadiyah dan NU (Bruinessen, 2013; Hefner, 2019).

Diantara gerakan transnasional di Indonesia ini adalah kelompok Salafi yang berusaha mempromosikan interpretasi kewarganegaraan berbasis agama, berkontestasi dengan gerakan Islam moderat yang memperjuangkan kewarganegaraan pluralis (Chaplin, 2018). Baru-baru ini Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam Nahdhatul Ulama (NU), yang dikenal moderat (*wasati*), secara kelembagaan atau organisasi melakukan upaya rekonseptualisasi penyebutan istilah untuk non-Muslim yang merupakan warga negara Indonesia.

Sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluyah dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Kota Banjar pada 27-1 Maret 2019 mengusulkan penyebutan “kafir” untuk warga Indonesia yang nonmuslim diganti menjadi “*muwatinun*.” Sikap NU yang membahas kembali istilah ini lantaran ada sekelompok masyarakat yang mulai memberikan atribusi diskriminatif terhadap non-Muslim.(Widiastuti, 2019).

Usul ini memunculkan reaksi yang beragam di kalangan Muslim maupun non-Muslim di Indonesia. Reaksi paling keras datang dari kelompok Salafi. Pada 9 Maret 2019, situs milik Salafi paling populer di Indonesia, muslim.or.id,¹ menerbitkan artikel “Non Muslim Ya Kafir,” menentang penyebutan “muwatinun” atau “non Muslim” sebagai ganti kata “kafir” bagi orang-orang yang tidak beragama Islam di Indonesia. Reaksi dan perdebatan ini dapat dilihat dari banyaknya artikel di situs-situs *online* milik NU, Salafi dan Islam radikal yang membahas penggantian istilah “kafir” dengan “non-Muslim”, baik sebelum maupun sesudah munculnya usul Komisi Bahtsul Masail Maudluyah tersebut. Oleh karena itu adalah menarik untuk mengungkap rekonseptualisasi kewarganegaraan (*citizenship*) non-Muslim dalam pemikiran NU, Salafi dan Islam radikal di situs *online* milik masing-masing.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana konteks sosial dan politik wacana “kafir” dan kewarganegaraan?
2. Bagaimana pandangan NU, Salafi dan Islam radikal terhadap penggantian istilah “kafir” menjadi “non-Muslim” dan “muwathinun”?

¹ Situs ini menduduki peringkat 3 di Alexa untuk kategori Bahasa_Indonesia/Masyarakat/Agama/Islam (per Mei 2018).

3. Apakah justifikasi NU, Salafi dan Islam radikal dalam menjustifikasi pandangan masing-masing pada level institusional dan level sosial berbangsa dan bernegara?
4. Bagaimana NU dan Salafi merepresentasikan kelompok masing-masing, pihak lain, dan negara?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Konteks sosial dan politik wacana “kafir” dan kewarganegaraan
2. Pandangan NU, Salafi dan Islam radikal terhadap penggantian istilah “kafir” menjadi “non-Muslim” dan “muwathinin”.
3. Rujukan NU, Salafi dan Islam radikal dalam menjustifikasi pandangan masing-masing pada level institusional dan level sosial berbangsa dan bernegara
4. Bentuk representasi kelompok masing-masing, pihak lain, dan negara

D. Signifikansi

Penelitian ini bermanfaat untuk memahami pandangan NU dan kelompok salafi dan Islam radikal terhadap penyebutan kata “kafir” terhadap non-Muslim dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kaitannya dengan kewarganegaraan. Pandangan ini dimuat dalam situs-situs Internet milik masing-masing kelompok. Bagi para peneliti dapat mengambil manfaat dari temuan penelitian ini tentang situs mana saja milik NU yang memuat pandangan resmi kepemimpinan yang sekarang dan situs-situs milik kelompok salafi dan Islam radikal yang tidak hanya memuat pandangan narasumber-narasumber dari luar NU, tapi juga memuat pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh NU yang suaranya tidak mendapat ruang di situs resmi NU dan situs-situs pendukung pimpinan NU yang sedang menjabat sekarang.

Aliansi faksi anti-pluralisme dalam tubuh NU dan kelompok Islam radikal bermanfaat bagi para peneliti untuk melihat lebih lanjut isu-isu lainnya yang mempertemukan kedua kelompok ini. Kemudian, dari segi kebijakan, keragaman pandangan yang dimuat dalam situs-situs yang disebut radikal oleh pemangku kebijakan seperti BNPT (Badan Nasional dan Penanggulangan Terorisme) dan selanjutnya diblokir Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) dapat menjadi pertimbangan apakah akan dilanjutkan pemblokiran atau tidak.

E. Penelitian Terdahulu

Dari segi mayoritas-minoritas, studi tentang Islam dan kewarganegaraan selama ini fokus pada dua kasus, yaitu: (1) kewarganegaraan Muslim di negara-negara non-Muslim dengan sistem demokrasi liberal (March, 2009) (2) kewarganegaraan non-Muslim di negara mayoritas Muslim baik yang klasik dan pra-modern (Martin, 2005; Yurdaydin, 1981) maupun yang kontemporer (Nielsen, 2002; Saeed, 1999; Scott, 2007). Perdebatan tentang kewarganegaraan non-Muslim ini tarik-menarik antara pihak yang ingin menjadikan ahli dzimmah sebagai model dan pihak yang berupaya mencari model baru.

Beberapa penelitian tentang Nahdhatul Ulama (NU) menggambarkan organisasi sebagai kelompok yang mempromosikan Islam yang pluralis, toleran dan “berkeadaban” (*civil Islam*) (Barton, 2002; Hefner, 2000). NU bersama Muhammadiyah dipandang oleh Alfred Stepan dan Jeremy Menchik (Stepan & Menchik, 2010) sebagai tulang punggung masyarakat yang toleran yang mendukung demokrasi dan menentang Indonesia menjadi negara Islam.

Namun, Menchik melihat perkembangan terakhir meragukan apakah sikap pluralis dan toleran NU adalah ideologi yang dianut berdasarkan prinsip-prinsip yang dipertahankan dalam segala keadaan, bukan sebagai strategi politik pragmatis. Menchik berargumen bahwa NU sebagai “contingent democrats” yang pada kondisi tertentu mendukung kaum Islamis dan autokrat, kadang mendukung demokrasi dan kadang autoritarianisme berdasarkan pertimbangan kepentingan material dan ideologis. Hal ini dapat dilihat dari aliansi NU dan actor-aktor anti-demokrasi dalam mempersekusi Ahmadiyah, penodaan agama oleh Ahok dan mendukung Ma’ruf Amin untuk demi patronase (Menchik, 2019).

Hal senada juga diungkapkan oleh Greg Fealy dan Robin Bush bahwa NU adalah organisasi yang punya kepentingan pribadi dan material (Bush, 2009; Fealy, 1998). Walaupun pada level pimpinan dan kepengurusan NU mempersepsikan diri sebagai pembela toleransi agama dan pluralisme, namun pada level akar rumput anggotanya banyak yang bersikap intoleran dan anti-pluralisme (Mietzner & Muhtadi, 2020). Sikap anti-pluralis ini juga tidak hanya terlihat pada anggota NU, tapi juga diperlihatkan oleh beberapa kyai (Kayane, 2020). Dari dalam tubuh NU sendiri ideologi ini ditentang oleh faksi garis keras, yaitu NU Garis Lurus. Faksi NU Garis Lurus memandang kepemimpinan NU dan para pendukungnya menyebarkan pemahaman sekularisme, pluralisme, dan liberalisme (Asep M. Iqbal, 2020).

Penelitian sebelumnya tentang ideologi dominan kepemimpinan NU serta faksi anti ideologi dominan di atas lebih fokus pada pandangan tentang toleransi terhadap toleransi internal umat Islam terkait Ahmadiyah dan Syiah serta non-Muslim yang melakukan penodaan terhadap Islam. Informasi ini bermanfaat untuk penelitian ini dalam rangka menggali sikap resmi institusional terutama pada NU dan wacana tandingan dalam internal NU sendiri.

Penelitian tentang penggunaan situs internet oleh NU untuk menyebarkan paham moderat (Basit & Chakim, 2018) melihat wacana Islam moderat di situs resmi NU. Apakah di dalam kasus pemberitaan dan pembahasan tentang penggunaan kata “kafir” untuk non-Muslim, situs NU hanya menampung dan memberi ruang untuk suara-suara Islam moderat, perlu penelitian lebih lanjut.

Penelitian tentang hubungan salafisme dan radikalisme sebagai paham di Indonesia menunjukkan adanya titik kesamaan antara keduanya, antara lain pada perjuangan untuk kembali ke ajaran awal Islam dengan atau tanpa kekerasan, yaitu tegaknya penerapan syariat Islam secara kaffah. Namun kelompok-kelompok radikal ini berbeda pendapat tentang apakah syariat Islam harus diterapkan dalam negara Islam, khilafah atau demokrasi. Dalam bentuk organisasi dan Gerakan, salafisme dan radikalisme terdapat pada Darul Islam (DI), Forum Komunikasi Ahlu Sunnah wal Jamaah (FKAWJ), Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir (HT), Jemaah Islamiyah (JI), Laskar Jihad (LJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Negara Islam Indonesia (NII) (Fealy, 2004). Radikalisme Islam di Indonesia setelah Suharto genealoginya dapat ditelusuri akarnya pada gerakan lokal Darul Islam (DI) dan Partai Masyumi serta jaringan Islam transnasional (van Bruinessen, 2002). Radikalisme juga dilihat dari latar belakang pendidikan tokohnya (Sirozi, 2005). Penelitian lainnya lebih fokus pada basis sosial munculnya Islam radikal di Indonesia (Hadiz, 2008).

Penelitian tentang penggunaan Internet oleh kelompok salafi dan Islam radikal di Indonesia, antara lain membahas penggunaan media internet oleh kelompok Islam radikal, isi dan narasi situs-situs radikal (Hui, 2010); untuk menyebarkan paham salafi dan wacana tandingan serta menyerang lawan yang beda paham (Asep Muhamad Iqbal, 2017); penggunaan Internet oleh faksi radikal dalam NU (Asep M. Iqbal, 2020). Namun, penelitian-penelitian ini tidak fokus pada wacana dan konter wacana penggunaan kata “kafir” untuk non-Muslim di Indonesia.

F. Metode, Analisis Data, dan Telaah Teoritik

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dari analisis korpus linguistik dan pendekatan kualitatif analisis wacana kritis. Sinergi metodologis antara keduanya diharapkan dapat mendeteksi hubungan antara kolokasi dan representasi ideologis antara teks-teks yang berseberangan ketika membahas topik atau peristiwa wacana yang sama (Salama, 2011, p. h. 316).

BAB IV

Kesimpulan

A. Kesimpulan

Penggunaan kata “kafir” di ruang publik untuk non-Muslim dalam konteks sosial dan politik yang berimplikasi pada kewarganegaraan di Indonesia terjadi pada kasus pencalonan Ahok di Pilgub DKI Jakarta dan gambar pahlawan pada mata uang kertas. Pada kedua kasus ini tidak digunakan istilah “kafir dzimmi” atau “kafir harb.”

Pembahasan Munas NU yang meninjau ulang penyebutan non-Muslim dipahami prateksnya oleh kelompok salafi dan Islam radikal sebagai usaha NU untuk memberi jalan bagi calon presiden non-Muslim di Indonesia pada masa yang akan datang.

Pandangan pada situs-situs NU ingin membatasi penggunaan istilah kafir pada wilayah privat, keyakinan teologis yang tidak perlu diucapkan di ruang publik berbangsa dan bernegara. Namun, perlu diperjelas, menurut kelompok Islam radikal apakah penyebutan istilah itu di dalam forum internal umat Islam juga disebut sebagai ruang publik.

B. Penutup

Penelitian ini terbatas pada pembahasan tentang istilah “kafir” pada Munas NU dari sudut pro dan kontranya yang ada pada situs-situs tertentu. Untuk melihat konsistensi pandangan-pandangan yang mengemuka antara perdebatan hasil Munas ini dan perdebatan sebelumnya tentang penggunaan istilah kafir di ruang publik berbangsa dan bernegara di Indonesia perlu penelitian lebih lanjut pada perdebatan dan kontroversi sebelumnya mengenai wacana penyebutan kafir kepada non-Muslim untuk melihat implikasi ideologisnya.

Daftar Pustaka

- Abdillah, P. D. M. (2015). *Islam dan Demokrasi Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*. Prenada Media.
- Adolphs, S. (2006). *Introducing electronic text analysis: A practical guide for language and literary studies*. Routledge.
- Afkar, T. (2000). *Fiqh rakyat: Pertarungan fiqh dengan kekuasaan*. LKiS.
- Anjum, O. (2016a). Dhimmi Citizens: Non-Muslims in the New Islamist Discourse. *ReOrient*, 2(1), 31.
<https://doi.org/10.13169/reorient.2.1.0031>
- Anjum, O. (2016b). Salafis and Democracy: Doctrine and Context: Salafis and Democracy: Doctrine and Context. *The Muslim World*, 106(3), 448–473.
<https://doi.org/10.1111/muwo.12158>
- An-Na'im, A. A. (2010). Beyond dhimmihood: Citizenship and human rights. In R. W. Hefner (Ed.), *The New Cambridge History of Islam* (pp. 314–334). Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CHOL9780521844437.014>
- Arifianto, A. R. (2017). *Politics, Plurality and Inter-Group Relations in Indonesia-Islam Nusantara & Its Critics: The Rise of NU's Young Clerics*.
- Baker, P., Gabrielatos, C., & McEnery, T. (2013). *Discourse analysis and media attitudes: The representation of Islam in the British press*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511920103>
- Barton, G. (2002). *Abdurrahman Wahid, Muslim democrat, Indonesian president: A view from the inside*. UNSW Press.
- Bartsch, S. (2004). *Structural and functional properties of collocations in English: A corpus study of lexical and pragmatic constraints on lexical co-occurrence*. Narr.
- Basit, A., & Chakim, S. (2018). The mainstreaming of Indonesian moderate Islam: A critical discourse analysis on Nahdlatul

Ulama and Muhammadiyah” s websites. *ON ISLAM AND MUSLIM SOCIETIES (ICONIS) 2018*, 320.

- Batubara, H. (2016). *Persoalkan 5 “Pahlawan Kafir” di Rupiah Baru, Ini Penjelasan Dwi Estiningsih*. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-3377301/persoalkan-5-pahlawan-kafir-di-rupiah-baru-ini-penjelasan-dwi-estiningsih>
- Bruinessen, M. van (Ed.). (2013). *Contemporary developments in Indonesian Islam: Explaining the “conservative turn.”* Institute of Southeast Asian Studies.
- Bush, R. (2009). *Nahdlatul Ulama and the struggle for power within Islam and politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Chaplin, C. (2018). Salafi Islamic piety as civic activism: Wahdah Islamiyah and differentiated citizenship in Indonesia. *Citizenship Studies*, 22(2), 208–223. <https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445488>
- Dijk, T. V. (1995). Ideological discourse analysis. In E. Ventola & A. Solin (Eds.), *New Courant: Special issue Interdisciplinary approaches to Discourse Analysis* (Vol. 4, pp. 135–161). English Dept, University of Helsinki.
- Durie, M., & Bat Ye’or. (2009). *The third choice: Islam, dhimmitude and freedom*. Deror Books.
- Duta.co. (2019, March 4). *Mengapa PBNU Risau dengan Kata ‘Kafir’, Gus A’am Wahib: Ini Politik dan Liberal Jadi Satu*. Duta.co Berita Harian Terkini. <https://redaksi.duta.co/mengapa-pbnu-risau-dengan-kata-kafir-gus-aam-wahib-ini-politik-dan-liberal-jadi-satu/>
- Eagleton, T. (1991). *Ideology: An introduction*. Verso.
- Ellis, K. C. (2018). *Secular Nationalism and Citizenship in Muslim Countries: Arab Christians in the Levant*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-71204-8>
- Elson, R. E. (2009). Another look at the Jakarta Charter controversy of 1945. *Indonesia*, 88, 105–130.
- Fadel, M. (2016). Islamic Law and Constitution-Making: The Authoritarian Temptation and the Arab Spring. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2711859>

- Fairclough, N. (1992). *Discourse and social change*. Polity.
- Fairclough, N. (2001). *Language and power* (2nd ed). Longman.
- Fairclough, N. (2003). *Analysing discourse: Textual analysis for social research*. Routledge.
- Fealy, G. (1998). *Ulama and Politics in Indonesia: A History of Nahdlatul Ulama, 1952–1967* [PhD Thesis]. Monash University.
- Fealy, G. (2004). Islamic Radicalism in Indonesia: The Faltering Revival? *Southeast Asian Affairs*, 104–121. JSTOR.
- Feillard, A. (1999). *NU vis-à-vis Negara: Pencarian isi, bentuk dan makna*. LKiS.
- Hadiz, V. R. (2008). Towards a Sociological Understanding of Islamic Radicalism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 38(4), 638–647.
<https://doi.org/10.1080/00472330802311795>
- Halliday, M. A. K. (1966). Lexis as a linguistic level' In C.E. Bazell, J.C. Catford, M.A.K. Halliday and R.H. Robins (eds.), In Memory of J. R. Firth, pp. 148–62. London: Longmans Green. In J. Rupert. Firth & C. Ernest. Bazell (Eds.), *In memory of J.R. Firth*. Longmans, Green & C.; /z-wcorg/.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hefner, R. W. (2019). Whatever Happened to Civil Islam? Islam and Democratisation in Indonesia, 20 Years On. *Asian Studies Review*, 0(0), 1–22.
<https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1625865>
- Hui, J. Y. (2010). The Internet in Indonesia: Development and Impact of Radical Websites. *Studies in Conflict & Terrorism*, 33, 171–191. <https://doi.org/10.1080/10576100903400605>
- Hunston, S. (2010). *Corpora in applied linguistics* (7. print). Cambridge Univ. Press.
- Ichwan, M. N., Salim, A., & Srimulyani, E. (2020). Islam and Dormant Citizenship: Soft Religious Ethno-Nationalism and Minorities in Aceh, Indonesia. *Islam and Christian–Muslim Relations*, 1–26.
<https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1780407>

- Iqbal, Asep M. (2020, October 29). *Challenging moderate Islam in Indonesia: NU Garis Lurus and its construction of the “authentic” NU online*. Rising Islamic Conservatism in Indonesia; Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003010920-6>
- Iqbal, Asep Muhamad. (2017). *Cyber-activism and the Islamic Salafi movement in Indonesia* [Phd, Murdoch University].
<https://researchrepository.murdoch.edu.au/id/eprint/36066/>
- Isin, E. F., & Nyers, P. (Eds.). (2014). *Routledge handbook of global citizenship studies*. Routledge.
- Isin, E. F., & Turner, B. S. (2002). Citizenship Studies: An Introduction. In E. F. Isin & B. S. Turner (Eds.), *Handbook of citizenship studies*. SAGE.
http://www.123library.org/book_details/?id=356
- Jørgensen, M., & Phillips, L. (2002). *Discourse analysis as theory and method*. Sage Publications.
- Kayane, Y. (2020). Understanding Sunni-Shi’a sectarianism in contemporary Indonesia: A different voice from Nahdlatul Ulama under pluralist leadership. *Indonesia and the Malay World*, 1–19.
<https://doi.org/10.1080/13639811.2020.1675277>
- KOMINFO, P. (n.d.). *BNPT Minta Kominfo Blokir 22 Situs Radikal*. Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. Retrieved November 28, 2020, from
http://index.php/content/detail/4627/BNPT+Minta+Kominfo+Blokir+22+Situs+Radikal/0/berita_satker
- Lansford, T. (2015). *Political handbook of the World 2015*. SAGE Publications, Inc.
- Lim, M. (2005). *Islamic radicalism and Anti-Americanism in Indonesia: The role of the internet*. East-West Center Washington.
- March, A. F. (2009). *Islam and liberal citizenship: The search for an overlapping consensus*. Oxford University Press.
- Martin, R. C. (2005). From Dhimmis to Minorities: Shifting Constructions of the Non-Muslim Other from Early to Modern Islam. In M. SHATZMILLER (Ed.), *Nationalism and Minority Identities in Islamic Societies* (pp. 3–21). McGill-Queen’s

University Press; JSTOR.

<http://www.jstor.org/stable/j.ctt8093r.4>

- Menchik, J. (2019). Moderate Muslims and Democratic Breakdown in Indonesia. *Asian Studies Review*, 43(3), 415–433. <https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1627286>
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation. *Asian Studies Review*, 42(3), 479–497. <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2020). The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 42(1), 58–84.
- Nielsen, J. S. (2002). Contemporary Discussions on Religious Minorities in Islam. *Brigham Young University Law Review*, 2002, 353.
- NU. (n.d.). *Inilah Daftar dan Pengelola Website Aswaja NU | Nahdlatul Ulama.id: Syiar Digital NU*. Retrieved July 21, 2019, from <http://nahdlatul Ulama.id/blog/2017/04/25/inilah-daftar-website-aswaja-nu/>
- Poljarevic. (2017). The Ambiguity of Citizenship in Contemporary Salafism. In R. Meijer & N. Butenschøn (Eds.), *The Crisis of Citizenship in the Arab World*. BRILL. https://doi.org/10.1163/9789004340985_015
- Rabasa, A. M. (2003). Chapter 2: Indonesia: the Jihad project. *The Adelphi Papers*, 43(358), 25–37. <https://doi.org/10.1080/714027891>
- Rabo, A. (2012). ‘We are Christians and we are equal citizens’: Perspectives on particularity and pluralism in contemporary Syria. *Islam and Christian–Muslim Relations*, 23(1), 79–93. <https://doi.org/10.1080/09596410.2011.634598>
- Republika. (2016, September 4). *Puluhan Ribu Massa Dukung Pemimpin Muslim*. Republika Online. <https://republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/09/04/ocz5uy282-puluhan-ribu-massa-dukung-pemimpin-muslim>

- Saeed, A. (1999). Rethinking citizenship rights of non-Muslims in an Islamic state: Rashid al-Ghannūshi's contribution to the evolving debate. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 10(3), 307–323.
<https://doi.org/10.1080/09596419908721189>
- Salama, A. H. Y. (2011). Ideological collocation and the recontextualization of Wahhabi-Saudi Islam post-9/11: A synergy of corpus linguistics and critical discourse analysis. *Discourse & Society*, 22(3), 315–342.
<https://doi.org/10.1177/0957926510395445>
- Scott, R. M. (2007). Contextual Citizenship in Modern Islamic Thought. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 18(1), 1–18.
<https://doi.org/10.1080/09596410601070990>
- Sinclair, J. (1995). *Corpus, concordance, collocation* (3. impr). Oxford Univ. Press.
- Sirozi, M. (2005). The Intellectual Roots of Islamic Radicalism in Indonesia: Ja'far Umar Thalib of Laskar Jihad (Jihad Fighters) and His Educational Background*. *The Muslim World*, 95(1), 81–120. <https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.2005.00080.x>
- Stepan, A., & Menchik, J. (2010). *Islam in Indonesia: Democratisation from Below - Qantara.de*. Qantara.de - Dialogue with the Islamic World.
<https://en.qantara.de/content/islam-in-indonesia-democratisation-from-below>
- Stubbs, M. (2001). *Words and phrases: Corpus studies of lexical semantics*. Blackwell Publishers.
- Suryawan, I. N. (2010). *Genealogi kekerasan dan pergolakan subaltern: Bara di Bali Utara* (Cet. 1). Prenada.
- Tempo. (1998, October 27). *Wawancara Prof. Dr. Ahmad Muflih Saefuddin*: Tempo.
<https://majalah.tempo.co/read/nasional/96673/wawancara-prof-dr-ahmad-muflih-saefuddin>
- Tempo.co. (2016, December 22). *Sebut 5 Pahlawan Kafir, Dwi: Jangan Ajari Saya Toleransi*. Tempo.
<https://nasional.tempo.co/read/829857/sebut-5-pahlawan-kafir-dwi-jangan-ajari-saya-toleransi>

- Tim Cyber NU dan LTN PBNU Kumpulkan Situs Islam Radikal dan Hoax, Ini Daftarnya—Liputan Islam.* (n.d.). Retrieved July 21, 2019, from <http://liputanislam.com/indonesiana/tim-cyber-nu-dan-ltn-pbnu-kumpulkan-situs-islam-radikal-dan-hoax-ini-daftarnya/>
- van Bruinessen, M. (2002). Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia. *South East Asia Research*, 10(2), 117–154. <https://doi.org/10.5367/000000002101297035>
- Wahid, A. (2010). *Gus Dur menjawab perubahan zaman: Warisan pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid.* Harian Kompas.
- Wichelen, S. van. (2010). *Religion, politics and gender in Indonesia: Disputing the Muslim body.* Routledge.
- Widiastuti, R. (2019, March 1). *NU Usul Sebutan Kafir ke Nonmuslim Indonesia Dihapus.* Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1180643/nu-usul-sebutan-kafir-ke-nonmuslim-indonesia-dihapus>
- Wijsen, F. (2013). 'There are radical Muslims and normal Muslims': An analysis of the discourse on Islamic extremism. *Religion*, 43(1), 70–88. <https://doi.org/10.1080/0048721X.2013.742745>
- Yurdaydin, H. G. (1981). Non-Muslims in Muslim societies: The historical view. *Institute of Muslim Minority Affairs. Journal*, 3(1), 183–188. <https://doi.org/10.1080/02666958108715824>